

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Kecamatan Bantarkalong adalah salah satu wilayah kecamatan yang berada di Kabupaten Tasikmalaya dengan luas 56.69 km² berada pada ketinggian tempat rata-rata 253 meter dari permukaan laut (Hendrayana, 2018). Kecamatan Bantarkalong terdiri dari delapan desa, dan di setiap desanya terdapat hutan rakyat yang biasa dijadikan sumber pencaharian para penduduknya.

Istilah hutan rakyat muncul pada penjelasan Undang-undang Nomor 5/1967 tentang Pokok-pokok Kehutanan. Pengertian hutan rakyat sebagaimana yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.49/kpts-II/1997 adalah hutan yang tumbuh di atas tanah hak milik dengan ketentuan minimal 0,25 ha dan penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan minimal 50% dan atau pada tahun pertama jumlah batang minimal 500 batang/ha (Sumarna, 2015).

Hutan rakyat sering diasosiasikan dengan sistem manajemen dan strategi penggunaan lahan terpadu untuk tanaman kayu dan non kayu, biasanya dengan tujuan dan orientasi yang dinamis dan kadang beragam. Ragam tujuan ditentukan oleh strategi pemenuhan kebutuhan hidup. Sering dikatakan bahwa praktek pengelolaan hutan rakyat merupakan gambaran dari pilihan produksi yang cukup fleksibel untuk mengoptimalkan utilitas lahan, tenaga kerja, dan berbagai kendala lain, serta untuk mengurangi berbagai faktor resiko (Maryudi dan Ani, 2017).

Dalam praktek pengelolaan hutan rakyat, para penggarap atau petani hutan rakyat tidak sedikit yang menerapkan sistem atau teknologi agroforestri untuk menghasilkan ragam produk dalam satu ruang dan waktu. Menurut Hairiah, Sardjono dan Sabarnurdin (2003), agroforestri merupakan suatu sistem penggunaan lahan dimana kegiatan kehutanan, pertanian, dan peternakan dikombinasikan secara bersama-sama.

Sistem agroforestri dalam pengelolaan lahan hutan rakyat bertujuan untuk meningkatkan produktivitas lahan secara berkelanjutan. Pengelolaan lahan berkelanjutan salah satunya dicirikan oleh sejauh mana aspek konservasi tanah diperhatikan. Upaya meningkatkan atau mempertahankan kesuburan tanah

menjadi penting agar daya dukung lahan tidak semakin berkurang sehingga produktivitas tetap lestari. Pengelolaan tanah yang berkelanjutan adalah upaya pemanfaatan tanah melalui pengendalian masukan dalam suatu proses untuk memperoleh produktivitas tinggi secara berkelanjutan, meningkatkan kualitas tanah, serta memperbaiki karakteristik lingkungan (Barchia, 2009).

Kapulaga merupakan tanaman rempah berumur tahunan yang banyak ditanam masyarakat karena bernilai ekonomi tinggi dan dapat tumbuh baik di bawah tegakan hutan rakyat. Budidaya tanaman kapulaga tidak memerlukan lahan tersendiri, dalam arti kapulaga dapat ditanam sebagai tanaman sela atau tanaman tumpangsari. Menurut Kusumedi dan Jariyah (2010), pendapatan bersih dari kapulaga selama 9 tahun dengan pola tanam agroforestry sengon pada luas lahan 0,5 ha adalah Rp. 287.137.440,-.

Tanah yang cocok untuk ditanami kapulaga adalah tanah lempung yang berwarna coklat, memiliki humus tebal dan berdrainase baik, tanah yang memiliki topografi rata sampai miring dapat ditanami tanaman ini. Di lahan yang berlereng curam, rumpun tanaman yang terbentuk akan berfungsi mengurangi atau menghambat aliran air permukaan yang berlebihan sehingga erosi permukaan dapat ditekan (Saputra, 2014).

Petani dalam menerapkan sistem agroforestri banyak dipengaruhi oleh budaya dan sosial ekonomi setempat, sedangkan syarat tumbuh tanaman dan kecocokan serta kekurangannya agroforestri jarang diperhatikan karena terbatasnya pengetahuan petani. Agroforestri merupakan model pengelolaan pemanfaatan lahan untuk menghasilkan ragam produk dalam ruang dan waktu yang sama dengan memadukan prinsip silvikultur dan agronomi. Kehadiran pohon dalam sistem agroforestri tidak selalu menimbulkan keuntungan tetapi juga dapat menimbulkan kerugian (Maryudi dan Ani, 2017).

Menurut Hairiah, Noordwijk dan Suprayogo (2002), dalam sistem agroforestri, pohon yang perakarannya lebih dalam dari pada tanaman yang lain akan lebih memungkinkan untuk menyerap air dan hara dari lapisan yang lebih dalam, sehingga kondisi lingkungan di sekitar tanaman dengan waktu singkat akan berubah (ketersediaan hara semakin berkurang), yang akhirnya akan menimbulkan kompetisi antar tanaman.

Kurangnya pengetahuan petani mengenai kesesuaian tanaman yang diusahakan dalam sistem agroforestri akan menimbulkan masalah dan merugikan petani. Untuk itu, kajian mengenai kesesuaian lahan di bawah tegakan hutan rakyat untuk sistem agroforestri kapulaga dirasakan perlu dilakukan.

1.2 Identifikasi masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka dapat diidentifikasi masalah, Apakah lahan dibawah tegakan hutan rakyat di Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya sesuai untuk sistem agroforestri tanaman kapulaga ?

1.3 Maksud dan tujuan

Maksud dari penelitian ini adalah mengevaluasi kesesuaian lahan untuk tanaman kapulaga di bawah tegakan pada hutan rakyat di Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya dengan sistem agroforestri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian lahan tanaman kapulaga dibawah tegakan pada hutan rakyat di Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya dengan sistem agroforestri.

1.3 Kegunaan penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan tambahan ilmu pengetahuan, pemahaman dalam memanfaatkan dibawah tegakan hutan rakyat di Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya untuk sistem agroforestri kapulaga.